

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S dan Asmara J.A. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah, Bukti Empiris, atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang. Agustus.
- Darwanto Dan Yustikasari, Y. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Halim, Abdul. 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim dan Abdullah,S. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.<http://www.bppk.depkeu.go.id>.
- Jane S. Shaw (2009). *Teori Pilihan Publik*. <http://materibelajar.wordpress.com> diakses 25 Juli 2012
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi keempat. Penerbit Andi C.V. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prasojo, Eko. 2009. *Reformasi Kedua-Melanjutkan Estafet Reformasi*. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta.
- Ritonga dan Alam. 2010. Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilihan kepala daerah). *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009.
- Yuwani, I.I. 2011. Analisis Rasio Alokasi Belanja Antara Daerah Incumbent Dan Daerah Non Incumbent Sebelum dan Pada Saat Pemilihan kepala daerah. *Skripsi*. UNDIP. Semarang.

## **Undang-undang dan Peraturan Pemerintah**

Permendagri No 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

*UU Nomor 22 Tahun 1999. Tentang. Pemerintahan Daerah*

*Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004. Tentang. Emerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 109 Tahun 2000 (109/2000) Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Presiden Republik Indonesia

*Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 17 Tahun 2003. Tentang. Keuangan Negara*

*Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2004. Tentang. Perbendaharaan Negara*